

# LOKA PENGAWAS OBAT & MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU



## TAHUN ANGGARAN 2024



## LAPORAN KEUANGAN AUDITED

### LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Yos Sudarso No. 9C RT.03, Kel. Watervang Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau - 31625  
Telp. (0733) 328 55590; 328 5450; 081211108864 (WA), Email : loka\_lubuklinggau@pom.go.id  
Subsite : lubuklinggau.pom.go.id Website : www.pom.go.id

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga Laporan Keuangan yang kami susun untuk Tahun 2024 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Lubuklinggau, 05 Mei 2025

Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



Rony Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b>	7
<b>RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN</b>	8
1. Laporan Realisasi Anggaran	8
2. Neraca	8
3. Laporan Operasional	8
4. Laporan Perubahan Ekuitas	9
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
<b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>	10
<b>II. NERACA</b>	11
<b>III. LAPORAN OPERASIONAL</b>	12
<b>IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	13
<b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	14
A. Penjelasan Umum	14
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	14
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.3. Basis Akuntansi	18
A.4. Dasar Pengukuran	18
A.5. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	31
B.3. Belanja Pegawai	33
B.4. Belanja Barang	35
B.5. Belanja Modal	36
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar	38
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka	38
C.1.2. Persediaan	39
C.2. Aset Tetap	40

C.2.1. Tanah	40
C.2.2. Peralatan dan Mesin	41
C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	43
C.3.1. Utang Pihak Ketiga	43
C.4. Ekuitas	44
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan	45
D.2. Beban Pegawai	45
D.3. Bahan Persediaan	46
D.4. Beban Barang dan Jasa	46
D.5. Beban Pemeliharaan	48
D.6. Beban Perjalanan Dinas	48
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.8. Kegiatan Non Operasional	50
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1. Ekuitas Awal	51
E.2. Surplus (Defisit) LO	51
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	51
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	51
E.4. Transaksi Antar Entitas	51
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	52
E.4.2. Transfer Masuk	52
E.5. Ekuitas Akhir	53
F. Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya	54
F.1. Gedung Kantor dan Mobil Operasional	54
F.2. Pengelola Keuangan	54
F.3. Nomor rekening dan NPWP	55
F.4. Alat gelas kualitatif	55
F.5. Barang bukti	56
F.6. Program Prioritas Nasional	57
F.7. Pengungkapan Tematik APBN	60
F.8. Capaian Output Strategis lainnya	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kualitas Piutang	22
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 3 Rincian Laporan Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Semester I TA 2024	31
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023	31
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023	32
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023	35
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023	36
Tabel 10 Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2024	37
Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023	38
Tabel 12 Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023	38
Tabel 13 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023	39
Tabel 14 Tabel Stok Opname Persediaan Tahun 2024	39
Tabel 15 Rincian Mutasi Tanah	40
Tabel 16 Rincian Tanah TA 2024	40
Tabel 17 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2024	41
Tabel 18 Rincian Mutasi Tambah TA 2024	42
Tabel 19 Rincian Reklasifikasi Masuk TA 2024	42
Tabel 20 Rincian Transfer Masuk TA 2024	42
Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang TA 2024	43
Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024	43
Tabel 23 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024	44
Tabel 24 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	45
Tabel 25 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023	46
Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	47
Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023	48
Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023	49
Tabel 29 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023	49
Tabel 30 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023	50
Tabel 31 Transaksi Antar Entitas TA 2024	51
Tabel 32 DDEL dan DKEL TA 2024	52
Tabel 33 Transfer Masuk TA 2024	52
Tabel 34 Rincian Nomor rekening dan Saldo TA 2024	55
Tabel 35 Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif	56
Tabel 36 Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti	57
Tabel 37 Capaian Output Periode 31 Desember 2024	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan

16



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Jl. Garuda No.149 Kel. Lubuk Aman Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau 31614  
BADAN POM Tlp. (0733) 328 5590; 328 5450, Email : loka\_lubuklinggau@pom.go.id, Subsiti : lubuklinggau.pom.go.id

---

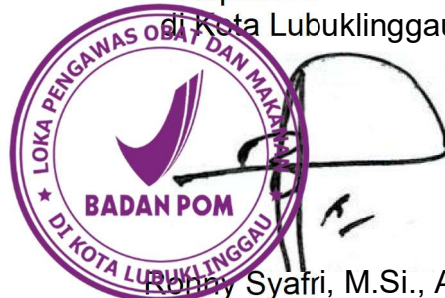
### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 05 Mei 2025

Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beserta perubahannya berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp555.000,00 dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.312.425.181,00 atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.497.759.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.370.087.762,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp77.626.362,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp7.237.267.493,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.720.836,00 dan Rp7.308.326.653,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00;

sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.327.060.615,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.327.060.615,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp555.000,00 dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp.0,00; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.326.505.505,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp6.879.212.680,00; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.286.465.342,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.755.619.588,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp7.348.366.926,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024			% THD ANGGARAN	2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>						
Penerimaan Negara bukan Pajak	B.1	0,00	555.000,00	555.000,00	0	600.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>		0,00	555.000,00	555.000,00	0	600.000,00
<b>BELANJA</b>	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	2.070.178.000,00	2.038.775.253,00	( 31.402.747,00 )	98,00	1.809.412.041,00
Belanja Barang	B.4	2.198.412.000,00	2.065.529.538,00	( 132.882.462,00 )	94,00	1.773.151.360,00
Belanja Modal	B.5	229.169.000,00	208.120.390,00	( 21.048.610,00 )	91,00	121.587.034,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		4.497.759.000,00	4.312.425.181,00	( 185.333.819,00 )	96,00	3.704.150.435,00

Lubuklinggau, 05 Mei 2025

Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Belanja dibayar di Muka	C.1.1	0,00	11.771.090,00
Persediaan	C.1.2	77.626.362,00	58.674.451,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>77.626.362,00</b>	<b>70.445.541,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	6.065.021.000,00	6.065.021.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.964.674.018,00	1.757.553.628,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	442.561.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	1.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	( 1.235.988.525,00 )	( 1.007.369.042,00 )
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>7.237.267.493,00</b>	<b>6.815.205.586,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	C.3		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.1	15.513.634,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>15.513.634,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>7.330.407.489,00</b>	<b>6.885.651.127,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	21.720.836,00	6.438.447,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>21.720.836,00</b>	<b>6.438.447,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>21.720.836,00</b>	<b>6.438.447,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>	C.5	7.308.326.653,00	6.879.212.680,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>7.308.326.653,00</b>	<b>6.879.212.680,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>7.330.047.489,00</b>	<b>6.885.651.127,00</b>

Lubuklinggau, 05 Mei 2025



Kepala Loka POM  
Kota Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>			
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.038.775.253,00	1.809.412.041,00
Beban Persediaan	D.3	47.486.608,00	65.478.603,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.019.034.044,00	919.248.873,00
Beban pemeliharaan	D.5	46.807.344,00	19.450.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	946.337.883,00	783.101.509,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	228.619.483,00	245.130.490,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL</b>		<b>4.327.060.615,00</b>	<b>3.841.821.516,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(4.327.060.615,00)</b>	<b>(3.841.821.516,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		555.000,00	600.000,00
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lain</b>	D.8	<b>555.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(4.326.505.615,00)</b>	<b>(3.841.221.516,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(4.326.505.615,00)</b>	<b>(3.841.221.516,00)</b>

Lubuklinggau, 05 Mei 2025



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	6.879.212.680,00	873.968.182,00
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(4.326.505.615,00)	(3.841.221.516,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	6.029.021.000,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		0,00	6.029.021.000,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.755.619.588,00	3.817.445.014,00
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		429.113.973,00	6.005.244.498,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>7.308.326.653,00</b>	<b>6.879.212.680,00</b>

Lubuklinggau, 05 Mei 2025



Kepala Loka POM  
Kota Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
	<b>A. PENJELASAN UMUM</b>
	<b>A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau</b>
<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:</p> <p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.</p> <p>(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.</p> <p><b>Pasal 34</b></p> <p>Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan <b>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</b></p> <p>Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.</p>

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Loka POM di Kota Lubuklinggau didukung struktur organisasi setingkat eselon IV terdiri dari :

- Kepala;
- Kelompok Jabatan Fungsional;

## **BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri dalam pengelolaan anggaran dan telah memiliki kode Satker sendiri (672851) sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-66/AAG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penambahan Refensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan

	<p>Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.</p> <p>Visi Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024</p> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; background-color: #fff9c4;"> <p><b><i>"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."</i></b></p> </div> <p>Misi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</li> <li>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</li> </ol>
<p><i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i></p>	<p><b>A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</b></p> <p>Laporan Keuangan Tahun 2024 (<i>Audited</i>) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari</p>

	<p>pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Loka POM.</p>
<p><i>Basis Akuntansi</i></p>	<p><b>A.3. Basis Akuntansi</b></p> <p>Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.</p> <p>Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.</p>
<p><i>Dasar Pengukuran</i></p>	<p><b>A.4. Dasar Pengukuran</b></p> <p>Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.</p> <p>Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.</p> <p>Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.</p>

<p><i>Kebijakan Akuntansi</i></p>	<p><b>A.5. Kebijakan Akuntansi</b></p> <p>Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 (<i>Audited</i>) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.</p> <p>Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :</p>
<p><i>Pendapatan-LRA</i></p>	<p>(1) Pendapatan – LRA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)</li> <li>● Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)</li> <li>● Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.</li> </ul>
<p><i>Pendapatan-LO</i></p>	<p>(2) Pendapatan – LO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.</li> <li>● Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan</li> </ul>

	<p>dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> <li>● Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan</li> </ul>
<i>Belanja</i>	<p>(3) Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).</li> <li>● Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).</li> <li>● Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ul>
<i>Beban</i>	<p>(4) Beban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.</li> <li>● Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ul>
<i>Aset</i>	<p>(5) Aset</p> <p>Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p>a. Aset Lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan</li> </ul>

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
  1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
    - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
    - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
    - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
  2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
  3. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No. 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga

tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :
  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
    - a. Harga pembelian
    - b. Biaya pengangkutan
    - c. Biaya penanganan
    - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
  2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
    - a. Potongan harga
    - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
    - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
  3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
  - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat gelas yang masih ada di gudang.</li> <li>2) Alat gelas di laboratorim yang belum digunakan.</li> <li>3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.</li> </ol> <p>b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat gelas yang masih ada di gudang.</li> <li>2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.</li> <li>2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.</li> <li>3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.</li> </ol> </li> </ul>
<i>Aset Tetap</i>	<p>b. Aset Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.</li> <li>b) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:</li> <li>c) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</li> <li>d) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</li> <li>e) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah,</li> </ol>

	<p>jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.</li> <li>● Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.</li> </ul>
<p><i>Penyusutan Aset Tetap</i></p>	<p>c. Penyusutan Aset Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.</li> <li>● Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tanah</li> <li>ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)</li> <li>iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.</li> </ul> </li> <li>● Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.</li> <li>● Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap</li> </ul>

semester selama masa manfaat.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki

	<p>untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.</li> <li>● Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.</li> <li>● Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat 4 Tahun.</li> <li>● Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.</li> </ul>
<p><i>Kewajiban</i></p>	<p>(6) Kewajiban</p> <p>Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.</p> <p>Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.</p> <p>a. Kewajiban Jangka Pendek</p>

	<p>Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.</p> <p>b. Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.</p>
<i>Ekuitas</i>	<p>(7) Ekuitas</p> <p>Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.</p>

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	<p>Selama periode berjalan, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu senilai Rp4.497.759.000,00.</p> <p>Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Terdapat 6 kali revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Revisi I DIPA pada DJPB tanggal 17 Januari 2024 dalam rangka Update halaman III DIPA dan revisi POK.</li><li>b. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 19 Januari 2024 dalam rangka Automatic Adjustment (Blokir mandiri).</li><li>c. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA.</li><li>d. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 April 2024 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA.</li><li>e. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Juli 2024 dalam rangka revisi DIPA dan penyesuaian hal.III DIPA</li><li>f. Revisi DIPA dan update halaman III DIPA tgl 10 juli 2024 kewenangan kanwil DJPB provinsi sumatera selatan</li></ul>
--	---

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Rincian Laporan Perubahan Anggaran  
Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja  
untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

URAIAN	2024		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	PERUBAHAN
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Jasa	0	0	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai (51)	2.070.178.000,00	2.070.178.000,00	0,00
Belanja Barang (52)	2.216.446.000,00	2.198.412.000,00	18.034.000,00
Belanja Modal (53)	211.135.000,00	229.169.000,00	(18.034.000,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.497.759.000,00</b>	<b>4.497.759.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp  
555.000,00

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TA 2024 adalah sebesar Rp555.000,00. Estimasi pendapatan yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp0,00. Perincian estimasi dan pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Perincian Realisasi Pendapatan TA 2024

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	%REALISASI PENDAPATAN
425911	Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran yang lalu	0,00	555.000,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>-</b>

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang

lalu yang merupakan kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala loka Tahun 2023 sebesar Rp555.000,00 sesuai NTPN Nomor FF70F1JNFV5C5S62 tanggal 06 Juni 2024.

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp  
4.312.425.181,00

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TA 2024 adalah sebesar Rp4.312.425.181,00 atau 95,93% dari anggaran belanja sebesar Rp4.497.759.000,00. Perincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Belanja Bruto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.070.178.000,00	2.039.995.363,00	98,54
Belanja Barang	2.198.412.000,00	2.066.429.538,00	94,00
Belanja Modal	229.169.000,00	208.120.390,00	90,82
<b>Belanja Netto</b>	<b>4.497.759.000,00</b>	<b>4.314.545.291,00</b>	<b>95,93</b>

Realisasi belanja netto TA 2024 (*Audited*) dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

JENIS BELANJA	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.039.995.363,00	1.809.597.045,00	12,73%
Belanja Barang	2.066.429.538,00	1.775.391.980,00	16,39%
Belanja Modal	208.120.390,00	121.587.034,00	71,17%
Belanja Bruto	4.314.545.291,00	3.706.576.059,00	16,40%
Pengembalian Belanja	2.120.110,00	2.425.624,00	-
Belanja Netto	4.312.425.181,00	3.704.150.435,00	16,42%

Realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,42% dari TA 2023. Hal ini disebabkan karena untuk belanja pegawai terdapat kenaikan gaji pegawai ASN dan penambahan pegawai PPPK. Sedangkan untuk belanja barang mengalami kenaikan 16,39% persen terutama pada jenis belanja perjalanan dinas karena Loka POM di kota Lubuklinggau terdapat kenaikan target (*output*) pengawasan Obat dan Makanan sehingga kegiatan pengawasan telah dilakukan secara rutin. Kemudian peningkatan jenis belanja barang juga terjadi pada belanja pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan alat pengolah data seperti Laptop/PC serta biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu mobling (mobil laboratorium keliling). Untuk belanja modal mengalami kenaikan 71,17% dikarenakan adanya pembelian alat lab.

Belanja Pegawai  
Rp  
2.038.775.253,00

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.038.775.253,00 dan Rp1.809.412.041,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,68% dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pegawai dan kenaikan gaji pegawai ASN.

Tabel 7  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	904.976.018,00	867.910.360,00	4,27%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	107.871.199,00	12.163.898,00	786,81%
Belanja Lembur	0,00	334.000,00	-
Belanja Tunjangan Khusus	1.027.148.146,00	929.188.787,00	10,54%
<b>Total Belanja kotor</b>	<b>2.039.995.363,00</b>	<b>1.809.597.045,00</b>	<b>12,73%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	1.220.110,00	185.004,00	-
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>2.038.775.253,00</b>	<b>1.809.412.041,00</b>	<b>12,68%</b>

Adapun perincian atas pengembalian belanja pegawai tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Perincian Pengembalian Belanja Pegawai TA 2024**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NO.DOKUMEN	TANGGAL	NO SP2D	NOMINAL
1	Potongan Belanja Pembulatan Gaji PNS	00050A	20 Februari 2024	240701303000160	38,00
4	Potongan Belanja Pembulatan Gaji PNS	00063A	22 Februari 2024	240701302000248	378,00
7	Potongan Belanja Pembulatan Gaji PNS	00121A	21 Maret 2024	240701302000430	90,00
8	Potongan Belanja Pembulatan Gaji PNS	00170A	5 Apr 2024	240701302000564	104,00
9	Potongan Belanja Gaji Pokok PNS	00471A	5 Sep 2024	240701504000177	1.219.500,00
<b>Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai</b>					<b>1.220.110,00</b>

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.065.529.538,00 dan Rp1.773.151.360,00. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan 16,49% dari realisasi belanja barang pada 2023 terutama pada jenis belanja perjalanan dinas karena Loka POM di kota Lubuklinggau terdapat kenaikan target (*output*) pengawasan Obat dan Makanan sehingga kegiatan pengawasan telah dilakukan secara rutin. Kemudian peningkatan jenis belanja barang juga terjadi pada belanja pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan alat pengolah data seperti Laptop/PC serta biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional yaitu mobling (mobil laboratorium keliling).

Tabel 9  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja barang operasional	250.883.969,00	423.071.854,00	(40,70%)
Belanja Barang Non Operasional	162.508.428,00	183.762.496,00	(11,57%)
Belanja Jasa	593.741.802,00	300.977.531,00	97,27%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	947.237.883,00	785.342.129,00	20,61%
Belanja Pemeliharaan	36.127.840,00	19.450.000,00	85,75%
Belanja Barang Persediaan	75.929.616,00	62.787.970,00	20,93%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.066.429.538,00</b>	<b>1.775.391.980,00</b>	<b>16,39%</b>
Pengembalian Belanja	900.000,00	2.240.620,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.065.529.538,00</b>	<b>1.773.151.360,00</b>	<b>16,49%</b>

Adapun perincian atas pengembalian belanja barang tersebut adalah pengembalian biaya transport panitia daerah kegiatan PI KIE dengan nominal Rp 900.000,00 NTPN No.DAAE55UOSLCJTAQN tanggal 02 April 2024.

Belanja Modal  
Rp  
208.120.390,00

## B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp208.120.390,00 dan Rp121.587.034,00 Realisasi belanja modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 71,17 % dibandingkan TA 2023.

Tabel 10  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.120.390,00	121.587.034,00	70,35%
Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>208.120.390,00</b>	<b>121.587.034,00</b>	<b>71,17%</b>

### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp207.120.390,00 dan Rp121.587.034,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 70,35% dibandingkan untuk periode TA 2023.

Realisasi belanja modal ini merupakan atas pembelian fasilitas perkantoran berupa:

**Tabel 11**  
**Pembelian Peralatan dan Mesin 2024**

(dalam rupiah)

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Hot Plate Stirer	1	11.433.000,00
2	Electronic Microbalance	1	6.882.000,00
3	Electric Desicator	1	17.500.000,00
4	Lemari Asam	1	114.500.000,00
5	Micro Pippettes	1	4.551.000,00
6	Wireless Access Point	2	2.400.000,00
7	Tablet PC	1	17.203.890,00
8	A.C. Split	2	14.263.500,00
9	Dispenser	1	1.000.000,00
10	Kursi Dorong	1	1.200.000,00
11	U.V Lamp (Alat Laboratorium Kimia)	1	3.200.000,00
12	Workbench (Alat Laboratorium Makar	3	12.987.000,00
Total		16	207.120.390,00

### **B.5.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan untuk periode yang berakhir TA 2023.

Realisasi belanja modal ini merupakan atas pembelian fasilitas perkantoran berupa:

**Tabel 12**  
**Pembelian Aset Tetap Lainnya 2024**

(dalam rupiah)

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Monografi	1	1.000.000,00
Total		1	1.000.000,00

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar  
Rp77.626.362,00

### C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp77.626.362,00 dan Rp70.445.541,00.

Belanja  
Dibayar  
Dimuka  
Rp0,00

#### C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka

Nilai belanja dibayar di muka pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.771.090,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Persediaan  
Rp  
77.626.362,00

#### C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp77.626.362,00 dan Rp58.674.451,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 13  
Perbandingan Perincian Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	40.095.194,00	58.282.215,00
Suku Cadang	24.053.932,00	392.236,00
Bahan Baku	13.477.236,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.626.362,00</b>	<b>58.674.451,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Telah dilakukan stock opname sesuai BA SO nomor PL.03.01.9C.12.24.98 tanggal 31 Desember 2024. Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 dan kondisi usang senilai Rp0,00.

Aset Tetap  
Rp  
7.237.267.493,00

### C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.237.267.493,00 dan Rp6.815.205.586,00. Aset tetap pada Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

Tanah Rp  
6.065.021.000,00

#### C.2.1 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.065.021.000,00 dan Rp6.065.021.000,00.

Tabel 14  
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>6.065.021.000,00</b>
Mutasi tambah :	<b>0,00</b>
Mutasi Kurang :	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>6.065.021.000,00</b>
<b>Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2024</b>	<b>0,00</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>6.065.021.000,00</b>

Tabel 15  
Rincian Tanah TA 2024

No	Uraian	Luas	Lokasi	Status Sertifikasi BMN	Jenis Sertifikat	Pemegang Hak	No. Sertifikat	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.115 m <sup>2</sup>	Jl. Letkol Sukimo, Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1	Bersertifikasi	Hak Pakai	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan	No. 00054	6.065.021.000
<b>Jumlah</b>								<b>6.065.021.000</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp  
1.964.674.018  
,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.964.674.018,00 dan Rp1.757.553.628,00. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2024

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>		<b>1.757.553.628,00</b>
Mutasi tambah :		
Pembelian	207.120.390,00	
Reklasifikasi Masuk	6.882.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>214.002.390,00</b>
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar	(6.882.000,00)	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>(6.882.000,00)</b>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>1.964.674.018,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		(1.227.137.305,00)
<b>Nilai Buku 31 Desember 2024</b>		<b>737.536.713,00</b>

Mutasi tambah terdiri dari pembelian dan reklasifikasi masuk senilai Rp214.002.390,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17  
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin  
(dalam rupiah)

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Hot Plate Stirer	1	11.433.000,00
2	Electronic Microbalance	1	6.882.000,00
3	Electric Desicator	1	17.500.000,00
4	Lemari Asam	1	114.500.000,00
5	Micro Pippettes	1	4.551.000,00
6	Wireless Access Point	2	2.400.000,00
7	Tablet PC	1	17.203.890,00
8	A.C. Split	2	14.263.500,00
9	Dispenser	1	1.000.000,00
10	Kursi Dorong	1	1.200.000,00
11	U.V Lamp (Alat Laboratorium Kimia)	1	3.200.000,00
12	Workbench (Alat Laboratorium Makan)	3	12.987.000,00
Total		16	207.120.390,00

Terdapat Reklasifikasi Masuk sebesar Rp216,674,00 berupa *Top Loading Balance* (Alat Laboratorium Farmasi) merupakan reklasifikasi akibat kesalahan kode barang berdasarkan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.9C.06.24.29 tanggal 19 Juni 2024 dan Terdapat Reklasifikasi Keluar sebesar Rp216.674,00 berupa *Electronic Microbalance* merupakan reklasifikasi akibat kesalahan kode barang berdasarkan Surat Keterangan Nomor PL.03.01.9C.06.24.29 tanggal 19 Juni 2024

Gedung dan  
Bangunan  
Rp  
442.561.000,0  
0

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp442.561.000,00 dan Rp0,00. Rincian Mutasi gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024  
(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>		<b>0,00</b>
Mutasi tambah :		
Hibah	442.561.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>442.561.000,00</b>
Mutasi kurang:		
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>442.561.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024		(8.851.220,00)
<b>Nilai Buku 31 Desember 2024</b>		<b>433.709.780,00</b>

Hibah masuk senilai Rp442.561.000,00 berupa pagar permanen seluas 403,07 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. No. 030/50.11/BPKAD.V/2024 ; PL.03.07.1.2.01.24.26 tanggal 16 Januari 2024 dan NPHD No. 030/04.11/BPKAD.V/2024;PL.03.07.1.2.01.24.27 tanggal 16 Januari 2024 .

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp1.000.000,  
00

### C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp0,00. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>		<b>0,00</b>
Mutasi tambah :		
Pembelian	1.000.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>1.000.000,00</b>
Mutasi kurang:		
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>		<b>1.000.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		0,00
<b>Nilai Buku 31 Desember 2024</b>		<b>1.000.000,00</b>

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp  
1.235.988.525  
,00

### C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp1.235.988.525,00 dan Rp1.007.369.042,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.964.674.018,00	- 1.227.137.305,00	737.536.713,00
2	Gedung dan Bangun	442.561.000,00	- 8.851.220,00	433.709.780,00
Total		2.407.235.018,00	- 1.235.988.525,00	1.171.246.493,00

Aset Lainnya  
Rp15.153.634  
,00

### C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15.153.634,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Lainnya  
Rp15.153.634  
,00

#### C.3.1 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15.153.634,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara

sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Adapun Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 19  
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

NO	Penyedia (PT)	Uraian Jenis Pekerjaan	Kontrak			SPM		SP2D		NILAI
			Nomor dan Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	PT. SABA SUKSES ALIH	Pengadaan Jasa Keaman	PL.02.01.9C.02.24.04 tanggal 1 Februari 2024	01 Februari 2024	31 Desember 2024	00007A	03 Januari 2025	2599913030002	03 Januari 2025	8.400.000,00
2	PT. SABA SUKSES ALIH	Pengadaan Jasa Kebers	PL.02.01.9C.02.24.05 tanggal 1 Februari 2024	01 Februari 2024	31 Desember 2024	00008A	03 Januari 2025	2599913030002	03 Januari 2025	6.753.634,00
<b>TOTAL</b>										<b>15.153.634,00</b>

*Kewajiban  
jangka pendek  
Rp21.720.836  
,00*

#### C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp21.720.836,00 dan Rp6.438.447,00.

*Utang kepada  
Pihak ke tiga  
Rp21.720.836  
,00*

##### C.4.1 Utang Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.720.836,00 dan Rp6.438.447,00. Adapun Rincian utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 19  
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024  
(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	NILAI
212112	Tagihan Listrik dan Telepon Bulan Desember 2024	6.567.202,00
212191	Jasa Keamanan dan Jasa kebersihan bulan Desember 2024	15.153.634,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.720.836,00</b>

*Ekuitas  
Rp  
7.308.326.653  
,00*

#### C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.308.326.653,00 dan Rp6.879.212.680,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pendapatan  
Rp 0,00

### D.1 Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban Pegawai  
Rp 2.038.775.253,00

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.038.775.253,00 dan Rp1.809.412.041,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 20  
Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Tunjangan PPH PNS	2.506.017,00	24.800,00	10004,91%
Beban Tunjangan Beras PNS	37.223.880,00	37.658.400,00	(1,15%)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	68.940.000,00	69.615.000,00	(0,97%)
Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	2.545.000,00	(100,00%)
Beban Uang Makan PNS	90.827.000,00	93.241.000,00	(2,59%)
Beban Tunjangan Struktural PNS	7.560.000,00	5.400.000,00	40,00%
Beban Gaji Pokok PNS	647.532.500,00	610.756.780,00	6,02%
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	39.136.510,00	38.444.138,00	1,80%
Beban Uang Lembur	0,00	334.000,00	(100,00%)
Beban Tunjangan Anak PNS	11.239.532,00	10.212.326,00	10,06%
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.579,00	12.916,00	(18,09%)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	921.459.696,00	915.403.337,00	0,66%
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(1.219.500,00)	0	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(610,00)	(4,00)	15150,00%
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(185.000,00)	-
Beban Gaji Pokok PPPK	84.513.100,00	8.899.500,00	849,64%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.179,00	138,00	754,35%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8.450.000,00	975.000,00	766,67%
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.882.920,00	217.260,00	766,67%
Beban Uang Makan PPPK	13.024.000,00	2.072.000,00	528,57%
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	105.688.450,00	13.785.450,00	666,67%
<b>JUMLAH</b>	<b>2.038.775.253,00</b>	<b>1.809.412.041,00</b>	<b>12,68%</b>

Beban Persediaan  
Rp 47.486.608,00

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp47.486.608,00 dan Rp65.478.603,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	46.298.201,00	65.478.603,00	(29,29%)
Beban Persediaan Bahan Baku	1.188.407,00	0,00	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>47.486.608,00</b>	<b>65.478.603,00</b>	<b>(27,48%)</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp1.019.034.044,0  
0

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.019.034.044,00 dan Rp919.248.873,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Kenaikan beban barang dan jasa dikarenakan adanya perbedaan biaya sewa gedung kantor dimana kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau pindah gedung kantor.

Tabel 22  
Perincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.847.000,00	486.300,00	896,71%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	54.708.000,00	76.494.000,00	(28,48%)
Beban Jasa Lainnya	228.820.708,00	77.615.000,00	194,82%
Beban Jasa Profesi	22.550.000,00	18.400.000,00	22,55%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	26.060.400,00	74.142.115,00	(64,85%)
Beban Barang Operasional Lainnya	14.289.000,00	0,00	-
Beban Sewa	276.888.270,00	151.907.266,00	82,27%
Beban Bahan	109.838.963,00	97.899.431,00	12,20%
Beban Langganan Air	131.410,00	613.110,00	(78,57%)
Beban Langganan Listrik	55.104.628,00	43.705.947,00	26,08%
Beban Honor Output Kegiatan	5.800.000,00	4.900.000,00	18,37%
Beban Langganan Telepon	22.146.631,00	20.173.200,00	9,78%
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	20.809.065,00	6.820.920,00	-
Beban Keperluan Perkantoran	177.039.969,00	346.091.554,00	(48,85%)
<b>Jumlah</b>	<b>1.019.034.044,00</b>	<b>919.248.843,00</b>	<b>10,86%</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp 46.807.344,00*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.807.344,00 dan Rp19.450.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pemeliharaan gedung dan bangunan. Perincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Perincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.836.150,00	0,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.291.690,00	19.450.000,00	14,61%
Beban Persediaan Suku Cadang	10.679.504,00	0,00	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>46.807.344,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>140,65%</b>

*Beban Perjalanan Dinas Rp 946.337.883,00*

### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp946.337.883,00 dan Rp783.101.509,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Perincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	458.250.480,00	405.481.705,00	13,01%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	377.716.403,00	234.924.424,00	60,78%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.705.000,00	69.900.000,00	22,61%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.566.000,00	75.036.000,00	(65,93%)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	(760.000,00)	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(900.000,00)	(1.480.620,00)	(39,21%)
<b>JUMLAH</b>	<b>946.337.883,00</b>	<b>783.101.509,00</b>	<b>20,84%</b>

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi Rp  
228.619.483,00

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp228.619.483,00 dan Rp245.130.490,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25  
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	228.619.483,00	245.130.490,00	(6,74%)
<b>Amortisasi</b>	<b>228.619.483,00</b>	<b>245.130.490,00</b>	<b>(6,74%)</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp 555.000,00

## D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26  
Perincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023  
(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	555.000,00	600.000,00	(7,50%)
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>555.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(7,50%)</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>555.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(7,50%)</b>

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya senilai Rp555.000,00, berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala loka Tahun 2023 sebesar Rp555.000,00 sesuai NTPN Nomor FF70F1JNFV5C5S62 tanggal 06 Juni 2024.

*Pos luar biasa  
Rp00*

#### **D.9. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2024 dan 2023.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp  
6.879.212.680,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.879.212.680,00 dan Rp873.968.182,00.

*Defisit LO Rp  
4.326.505.615,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.326.505.615,00 dan Rp3.841.221.516,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang  
Menambah/Mengur  
ang Ekuitas Rp  
0,00*

### E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp6.029.021.000,00. Koreksi tersebut merupakan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

*Koreksi atas  
Reklasifikasi Rp  
0,00*

#### E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar  
Entitas Rp  
4.755.619.588,00*

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.755.619.588,00 dan Rp3.817.445.014,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

Tabel 27  
Transaksi Antar Entitas TA 2024

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.312.425.181,00
Diterima dari Entitas Lain	(555.000,00)
Pengesahan Hibah Langsung	442.561.000,00
Transfer Masuk	1.188.407,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.755.619.588,00</b>

#### E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Loka POM di kota Lubuklinggau yang melibatkan kas Negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp555.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.312.425.181,00.

Tabel 28  
DDEL dan DKEL TA 2024

(dalam rupiah)

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
<b>Diterima dari entitas lain terdiri dari</b>	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	555.000,00
<b>JUMLAH DDEL</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Ditagihkan ke entitas lain terdiri dari :</b>	
Realisasi Belanja Pegawai	2.038.775.253,00
Realisasi Belanja Barang	2.065.529.238,00
Realisasi Belanja Modal	208.120.390,00
<b>JUMLAH DKEL</b>	<b>4.312.424.881,00</b>

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.188.407,00 terdiri dari:

Tabel 29  
Perincian Transfer Masuk TA 2024

(dalam Rupiah)

Entitas Asal	No BAST	Periode	Nama barang	Nilai
PPPOMN	PP.03.02.10.09.24. 313A	27-Sep-24	Alprazolam	65.569,00
			Asam mefenamat	57.059,00
			Bromazepam	150.000,00
			Deksametason	350.000,00
			Metformin hidroklorida	95.129,00
			Metilprednisolon	70.836,00
			Sildenafil sitrat	71.584,00
			Tramadol hidroklorida	60.530,00
			Triheksifenidil hidroklorida	267.700,00
<b>Total</b>			<b>1.188.407,00</b>	

### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp442.561.000,00 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan hibah ini berupa pagar permanen dengan Nomor 030/50.11/BPKAD.V/2024;PL.03.07.1.2.01.24.26 tanggal 16 Januari 2024

*Ekuitas Akhir Rp  
7.308.326.653,00*

### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.308.326.653,00 dan Rp6.879.212.680,00.

## F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Pengungkapan Penting Setelah Tanggal Neraca

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15.153.364,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Adapun Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 30  
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024  
(dalam rupiah)

NO	Penyedia (PT)	Uraian Jenis Pekerjaan	Kontrak			SPM		SP2D		NILAI
			Nomor dan Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	PT. SABA SUKSES ALIH	Pengadaan Jasa Keaman	PL.02.01.9C.02.24.04 tanggal 1 Februari 2024	01 Februari 2024	31 Desember 2024	00007A03	03 Januari 2025	259991303000203	03 Januari 2025	8.400.000,00
2	PT. SABA SUKSES ALIH	Pengadaan Jasa Kebers	PL.02.01.9C.02.24.05 tanggal 1 Februari 2024	01 Februari 2024	31 Desember 2024	00008A03	03 Januari 2025	259991303000203	03 Januari 2025	6.753.634,00
<b>TOTAL</b>										<b>15.153.634,00</b>

### F.2 Pengungkapan Penting Lainnya

#### F.2.1 Status Gedung Kantor Loka POM

Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Tahun 2024 masih menyewa gedung kantor yang beralamat di Jl. Garuda No.149 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Pada tanggal 22 Februari 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau pindah lokasi kantor yang berlokasi di Jl.

Yosudarso No. 9C Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau dikarenakan kondisi pada kantor lama sudah tidak dapat menampung operasional kantor.

### **F.2.2 Sewa Mobil Dinas Operasional**

Untuk kendaraan dinas jabatan kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menggunakan sewa pihak ketiga dengan nomor plat mobil BG 1201 IU dan periode sewa 02 Februari 2024 s.d 31 Desember 2024 sesuai dengan BAST NO.B-PL.02.01.9C.02.24.10 tanggal 02 Februari 2024.

### **F.2.3 Pengelola Keuangan**

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Nomor HK.02.02.10B.05.23.489 dan HK.02.02.10B5.09.23.1055 tentang Penunjukan pengelola anggaran Pada Satuan Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023, per tanggal 01 Oktober 2023 dan 01 Juni 2023 terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan satker Loka POM di Kota Lubuklinggau, yaitu sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ronny Syafri, M.Si.,Apt

Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Ikbal, S.E.

Pejabat Penandatanganan : Terry Rongga Nugraha, SH  
SPM

Bendahara Pengeluaran : Andi Naskan, A.Md.

PPABP : Muhammad Mursalin.,A.Md.,Kom

Pejabat Pengadaan : Ayu Afiatul Kamala, SH

### **F.2.4 Nomor rekening**

Adapun perincian nomor rekening dan saldo Loka POM di Kota Lubuklinggau 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 31  
Perincian Nomor Rekening dan Saldo 31 Desember 2024

Bank	Nomor Rekening	Nama	Saldo Per 31 Desember 2024
Bank Mandiri	8100126728511000	BPG070 BPOM LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	Rp0,00

### F.2.5 Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorim namun belum digunakan sesuai Peraturan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 975 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30  
Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	BOTOL KACA VIAL 5ML	Buah	81
2	BOTOL KACA VIAL 10ML	Buah	51
3	BOTOL KACA VIAL 20 ML	Buah	23
4	BOTOL SEMPROT	Buah	11
5	BOTOL REAGEN	Buah	4
6	THERMOMETER RAKSA	Buah	2
7	LUMPANG ALU	Buah	2
8	RAK TABUNG REAKSI	Buah	15
9	TABUNG REAKSI (16 x 150 mm) 15 ML	Buah	514
10	TOPLES KACA	Buah	6
11	ERLENMEYER FLASK 100ML	Buah	4
12	BEAKER LOW FORM 50ML	Buah	29
13	BEAKER LOW FORM 250ML	Buah	2
14	SEMPROTAN KLT	Buah	1
15	TABUNG REAKSI (11 x 100 mm) 5ML	Buah	182
16	CORONG GELAS	Buah	1
17	SPATULA AND SPOON	Buah	2
18	BATANG PENGADUK KACA	Buah	32
19	PIPET TETES PANJANG	Buah	10
20	PIPET TETES PENDEK	Buah	2
21	DISORABLE GLASS CAPILLARIES 5 UL	Buah	1
<b>Total</b>			<b>975</b>

### F.2.6 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM melakukan proses penyidikan di bidang obat dan makanan (Penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait pidana yang sedang ditangani sehingga dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sampai dengan 31 Desember 2024 barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di gudang barang bukti Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Tabel 31  
Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti

NO	proses	KLASIFIKASI							
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN
1	Proses SPDP/SPDP				8 item				
2	Tahap 1								
3	P-18/P-19								
4	P-21								
5	SP3								
<b>TOTAL (Pcs)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## F.2.7 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Satuan Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 2 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

### 1. Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas dengan pagu sebesar Rp 30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 21.195.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama satker	Program/kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Tar get	Capaian output Strategis	%
Loka POM di Kota Lubuklinggau	Fasilitas dan Pembinaan UMKM	27.776.000	27.706.333	99,75	UMKM	2	2	100,00

### 2. Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 5 (lima) program prioritas, 8 (delapan) kegiatan prioritas, dengan pagu mencapai Rp834.506.000,00 dan realisasi sebesar Rp 831.397.133 dengan rincian sebagai berikut :

Nama satker	Program /kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Tar get	Capaian output Strategi s	%
Loka POM di Kota Lubuklinggau	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	77.852.000	77.306.487	99,30	Laboratorium	1	1	100,00
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di Loka Pom Kota Lubuklinggau	167.232.000	166.788.059	99,73	Perkara	2	2	100,00
	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	152.775.000	152.262.887	99,66	Orang	291	348	119,59
	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	27.776.000	27.706.333	99,75	UMKM	2	2	100,00
	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.836.000	42.617.098	99,49	Produk	116	120	103,45
	Sampel Obat,	79.850.000	79.092.791	99,05	Produk	244	244	100,00

Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT								
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	37.178.000	37.085.618	99,75	Lembaga	50	57	114,00	
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	249.007.000	248.537.860	99,81	Lembaga	242	290	119,83	

### F.2.8 Pengungkapan Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema, 3 diantaranya terdapat di BPOM dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Anggaran Responsif Gender (ARG)(03)

Nama satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Lubuklinggau	55.266.000	55.129.698	99,75	Layanan	31	37	119,35	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	152.775.000	152.262.887	99,66	Orang	291	348	119,59	PN III

### 2. Anggaran Kesehatan (06)

Nama satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Lubuklinggau	61.803.000	61.213.481	99,05	Laporan	13	13	100,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	16.466.100	16.433.811	99,83	Keputusan	4	6	150,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	112.488.000	112.158.027	99,71	Laporan	1	1	100,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	55.266.000	55.129.698	99,75	Layanan	31	37	119,35	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	20.601.000	20.404.000	99,04	Paket	1	1	100,00	-

Loka POM di Kota Lubuklinggau	19.604.000	19.603.890	100,00	Unit	3	3	100,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	27.776.000	27.706.333	99,75	UMKM	2	2	100,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	77.852.000	77.306.487	99,30	Laboratorium	1	1	100,00	-
Loka POM di Kota Lubuklinggau	167.232.000	166.788.059	99,73	Perkara	2	2	100,00	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	152.775.000	152.262.887	99,66	Orang	291	348	119,59	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	42.836.000	42.617.098	99,49	Produk	116	120	103,45	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	79.850.000	79.092.791	99,05	Produk	244	244	100,00	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	37.178.000	37.085.618	99,75	Lembaga	50	57	114,00	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	249.007.000	248.537.860	99,81	Lembaga	242	290	119,83	PN III
Loka POM di Kota Lubuklinggau	180.000.000	178.913.900	99,40	Paket	1	1	100,00	PN III

Loka POM di Kota Lubuklinggau	3.053.878.000	3.017.171.851	99,40	Layanan	1	1	100,00	-
-------------------------------	---------------	---------------	-------	---------	---	---	--------	---

### 3. Upaya Konvergensi Penanganan Stunting (08)

Nama satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Lubuklinggau	152.775.000	152.262.887	99,66	Orang	291	348	119,59	PN III

#### F.2.9 Catatan Output Strategis Lainnya

Selama periode sampai dengan 31 Desember 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Unit Organisasi : Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Satuan Kerja : Loka POM di Kota Lubuklinggau

**Tabel 32**  
**Capaian Output sampai dengan 31 Desember 2024**

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3165.AEA	Kegiatan Koordinasi 001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	61.803.000	61.213.481	99,05	13	13	Laporan	100,00	
3165.BAH	Kegiatan Pelayanan Publik Lainnya 001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	16.461.000	16.433.811	99,83	4	6	Keputusan	150,00	
3165.BDC	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	152.775.000	152.262.887	99,66	291	348	Orang	119,59	
3165.BKB	Kegiatan Pemantauan produk 001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	112.488.000	112.158.027	99,71	1	1	Laporan	100,00	
3165.BMB	Kegiatan Komunikasi Publik 001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	55.266.000	55.129.698	99,75	31	37	Layanan	119,35	
3165.CAB	Kegiatan Sarana Bidang Kesehatan 002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20.601.000	20.404.000	99,04	1	1	Paket	100,00	
3165.CAN	Kegiatan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	19.604.000	19.603.890	100,00	3	3	Unit	100,00	
3165.PDD	Kegiatan Standarisasi Lembaga 001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	77.852.000	77.306.487	99,30	1	1	Laboratorium	100,00	
3165.QCD	Kegiatan Perkara Hukum Badan Usaha U27 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POMKOTA LUBUKLINGGAU	167.232.000	166.788.059	99,73	2	2	Perkara	100,00	
3165.QDG	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	27.776.000	27.706.333	99,75	2	2	UMKM	100,00	
3165.QIA	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.836.000	42.617.098	99,49	116	120	Produk	103,45	
	005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	79.850.000	79.092.791	99,05	244	244	Produk	100,00	
3165.QIC	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	37.178.000	37.085.618	99,75	50	57	Lembaga	114,00	
	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	249.007.000	248.537.860	99,81	242	290	Lembaga	119,83	
3165.RAB	Kegiatan Sarana Bidang Kesehatan 001 - Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	180.000.000	178.913.900	99,40	1	1	Paket	100,00	
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran	3.053.878.000	3.017.171.851	98,80	1	1	Layanan	100,00	
	<b>Subtotal</b>	<b>4.354.607.000</b>	<b>4.312.425.791</b>	<b>99,03</b>					